

KEGIATAN OPERASIONAL PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN 2006 - 2009

(Operational Activity of Food Security Development, 2006 - 2009)

Dewan Ketahanan Pangan¹

Rencana Aksi Ketahanan Pangan

Rencana aksi ketahanan pangan periode 2005-2009 adalah suatu panduan pelaksanaan kebijakan umum tersebut di tingkat lapangan, sekaligus merupakan penjabaran rinci dari setiap elemen kebijakan dengan sasaran dan *focal point-nya*, terutama lembaga pemerintah yang memiliki keterkaitan erat dalam ketahanan pangan. Rincian ini seyogyanya menjadi panduan bagi para *stakeholders* ketahanan pangan baik dari lembaga pemerintah, swasta, BUMN, perguruan tinggi maupun lembaga swadaya masyarakat dan kalangan masyarakat umum (lihat Matrik Kegiatan Operasional Pembangunan Ketahanan Pangan 2005 - 2009).

Pencapaian Swasembada Pangan Strategis

Ketahanan pangan nasional dicerminkan oleh kemandirian pangan. Hal ini menuntut pemenuhan kebutuhan pangan yang diutamakan bersumber dari produksi dalam negeri dan menentukan pengelolaan sistem pangan dalam negeri sesuai dengan kepentingan nasional serta tidak tunduk pada tekanan negara lain. Deptan telah menetapkan program prioritas pencapaian swasembada komoditas pangan strategis yang difokuskan pada 5 komoditas pangan yaitu (a) Padi (2) Jagung (3) Kedelai (4) Tebu dan (5) Daging Sapi.

a. Padi

Skenario pengembangan produksi padi melalui perluasan areal dan peningkatan produktivitas dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi agribisnis padi saat ini dan peluang peningkatan produksi berdasarkan potensi sumberdaya dan teknologi. Perluasan areal panen diproyeksikan meningkat sebesar 0.37 persen per tahun, di luar perluasan areal panen untuk kompensasi konversi lahan yang diproyeksikan meningkat sekitar 0.4 persen per tahun, sehingga secara total perluasan areal harus ditingkatkan sebesar 0.77 persen per tahun. Produktivitas diproyeksikan tumbuh sebesar 0.48 persen per tahun. Dengan skenario ini, pada tahun 2010

target luas panen padi mencapai sekitar 12.14 juta hektar dan produktivitas sekitar 4.67 ton GKG/ha. Dengan target tersebut, Indonesia akan dapat mencapai swasembada beras sampai 2010, bahkan dapat terus berlanjut hingga tahun berikutnya (Tabel 1).

Upaya pemenuhan kebutuhan beras nasional hingga tahun 2010 akan ditempuh melalui tiga cara, yaitu : (1) peningkatan produktivitas dengan menerapkan teknologi usahatani terobosan, (2) peningkatan luas areal panen melalui peningkatan intensitas tanam, pengembangan tanaman padi ke areal baru, termasuk sebagai tanaman sela perkebunan, rehabilitasi irigasi, dan pencetakan sawah baru, (3) peningkatan penanganan panen dan pasca panen untuk menekan kehilangan hasil dan peningkatan mutu produk, melalui pengembangan dan penerapan alat dan mesin pertanian (alsintan).

Peningkatan produktivitas usahatani padi ditempuh melalui: (a) peningkatan hasil potensial dan aktual varietas padi melalui perbaikan potensi genetik dan ketahanan terhadap kendala biotik (hama dan penyakit) dan abiotik (kekeringan dan keracunan), perbaikan budidaya spesifik lokasi (pengelolaan tanaman terpadu dan *prescription farming*, (b) percepatan dan perluasan diseminasi serta adopsi inovasi teknologi. Peningkatan produktivitas padi nasional ini sangat dimungkinkan bila ditinjau dari potensi pengembangan varietas unggul dan kesiapan teknologi padi di Balitbang Pertanian.

Peningkatan produktivitas tidak hanya diarahkan pada lahan optimal (sawah irigasi), tetapi juga pada lahan sub-optimal seperti lahan sawah tadah hujan, lahan kering, dan lahan rawa lebak/pasang surut, yaitu: (a) **Lahan sawah beririgasi**: peningkatan mutu intensifikasi (PMI) dengan pendekatan PTT melalui penggunaan varietas unggul spesifik (VUS) terbaru, padi hibrida (VUH) dan padi tipe baru (VUTB) yang berdaya hasil tinggi dan bermutu, termasuk pemupukan berimbang dan cara budidaya spesifik lokasi, (b) **Lahan sawah tadah hujan**: perbaikan komponen teknologi PTT terutama pola tanam, pengendalian gulma, varietas unggul baru (VUB) sesuai lokasi, pengelolaan hara spesifik lokasi termasuk pemanfaatan bahan organik.

¹ Dikutip dari hlm. 72- 94 dokumen Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006 - 2009. Dewan Ketahanan Pangan, Jakarta, 2006

Tabel 1. Skenario Pencapaian Swasembada Beras Berkelanjutan, 2005-2010 (dalam GKG)

Tahun	Luas panen (000 ha)	Produktivitas (ton/ha)	Produksi (000 ton)	Permintaan (000 ton)	S/D (000 ton)
2004	11.874	4,54	53.907	52.259	+1648
2005	11.918	4,56	54.366	52.837	+1529
2006	11.963	4,58	54.829	53.421	+1408
2007	12.007	4,61	55.296	54.012	+1284
2008	12.051	4,63	55.767	54.610	+1157
2009	12.096	4,65	56.242	55.214	+1028
2010	12.141	4,67	56.721	55.825	+896

(c) **Lahan kering (gogo):** melalui PTT yang mempertimbangkan aspek konservasi lahan, pola tanam, pengelolaan hara spesifik lokasi (PHSL) dan VUB sesuai lokasi, dan (d) **Lahan rawa pasang surut:** melalui PTT dan introduksi varietas padi sesuai lokasi, sawit dupa/duwit dupa, tata air mikro, konservasi lahan, dan PHSL + ameliorasi.

Dalam rangka menyiapkan dan meningkatkan penyediaan benih unggul guna meningkatkan potensi produktivitas, secara khusus dilaksanakan:

- Pemantapan pemuliaan, penelitian dan pelepasan varietas
- Peningkatan ketersediaan benih bermutu guna mendukung pencapaian sasaran peningkatan produksi tanaman pangan. Diharapkan pada tahun 2009 dapat tersedia benih padi bersertifikat sebanyak 140 700 ton
- Optimalisasi penggunaan benih bermutu melalui pemasyarakatan/sosialisasi benih bermutu
- Pengembangan sistem informasi perbenihan
- Optimalisasi kinerja kelembagaan perbenihan
- Penyempurnaan peraturan yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.

Peningkatan luas areal panen padi diarahkan pada: (a) Peningkatan Indeks Pertanaman (IP), minimal tetap 1,52 pada lahan sawah irigasi, melalui pemanfaatan sumberdaya air yang ada, termasuk rehabilitasi sarana irigasi yang didukung oleh teknologi budidaya, seperti penanaman varietas berumur pendek (genjah), sistem semai dan tanam; (b) Perluasan areal panen melalui program ekstensifikasi diupayakan dengan memanfaatkan lebih dari 2 juta ha lahan perkebunan dan hutan tanaman industri untuk ditanami padi gogo; (c) Pencetakan sawah baru untuk mengimbangi laju penciutan luas lahan sawah akibat konversi (terutama di Jawa), penambahan areal sawah baru. (d) Untuk mencegah penurunan luas panen karena gangguan hama dan penyakit

serta bencana alam, dikembangkan sistem perlindungan tanaman. Kegiatan ini dilaksanakan melalui penguatan database informasi daerah endemis hama dan penyakit serta bencana alam, penguatan kualitas sumberdaya manusia, penguatan kelembagaan, penyediaan teknologi dan pemasyarakatan pengendalian hama terpadu (PHT), dan pengadaan sarana pengendalian dan pengembangan sistem peringatan dini eksplosif hama penyakit, ancaman kekeringan dan banjir.

Peningkatan penanganan panen dan pascapanen dilaksanakan melalui (a) Menekan tingkat kehilangan hasil dilakukan melalui pengembangan teknologi pengolahan primer (pengeringan, penyimpanan dan penggilingan), alat-mesin pengolahan, standarisasi, informasi pasar, dan pengaturan tataniaga (pengendalian impor, insentif harga, bea masuk), (b) Meningkatkan nilai tambah beras dilakukan melalui pengembangan teknologi agro-industri pengolahan untuk peningkatan mutu. Dalam jangka panjang, akan diprioritaskan peningkatan mutu beras melalui pengembangan beras fungsional lainnya, seperti beras beryodium dan beras dengan indeks glikemik rendah, serta teknologi pemanfaatan produk samping, seperti sekam dan dedak.

Untuk mendukung keberhasilan upaya-upaya di atas, dilaksanakan pula pembentukan korporasi usaha yang diupayakan melalui pembentukan Kelompok Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT), pendidikan, latihan dan membangun kembali lembaga penyuluhan sebagai pusat pengembangan kelembagaan petani, asosiasi komoditi dan profesi serta pelayanan. Selain dengan instansi pemerintah, juga dilakukan penguatan koordinasi dengan swasta, asosiasi dan masyarakat agribisnis yang terkait dengan pembangunan tanaman pangan, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral/keterpaduan, yang melibatkan berbagai instansi terkait dan *stakeholder* secara bersama-sama.

b. Jagung

Dalam upaya mencapai swasembada jagung pada 2007 diperlukan sejumlah kebijakan untuk menciptakan iklim yang kondusif di sektor pertanian, yaitu: (a) pengembangan insentif investasi, (b) pengembangan kelembagaan keuangan dan permodalan pertanian, (c) peningkatan dukungan teknologi pertanian siap diterapkan di lapang, (d) peningkatan kualitas sumberdaya manusia, (e) peningkatan kelembagaan agribisnis, (f) peningkatan dukungan pemasaran, dan (g) dukungan peraturan/perundangan.

Apabila laju peningkatan produksi jagung dalam negeri dapat dipertahankan seperti rata-rata lima tahun terakhir (2000 - 2004), yakni sebesar 4.24 persen per tahun, dan laju peningkatan kebutuhan jagung sekitar 2.74 persen per tahun, maka pada tahun 2006 Indonesia telah dapat mencapai posisi swasembada jagung, dan bahkan mulai tahun 2007 Indonesia sudah ada mempunyai kelebihan produksi yang cukup besar, sekitar 339 ribu ton untuk diekspor. Pada tahun 2010, Indonesia diperkirakan dapat mengekspor jagung hingga mencapai 1 juta ton (Tabel 2). Mengingat Indonesia mempunyai prospek dan potensi untuk mengekspor jagung, maka upaya peningkatan kualitas produk akan mendapat perhatian khusus. Perbaikan proses pasca panen melalui pengeringan, merupakan prioritas utama, didukung investasi untuk pembangunan gudang penampungan dan/atau silo untuk menyimpan produk sebelum diekspor.

Upaya peningkatan kapasitas produksi jagung akan dilakukan melalui: (a) peningkatan produktivitas, (b) perluasan areal tanam, (c) peningkatan efisiensi produksi, (d) penguatan kelembagaan petani, (e) peningkatan kualitas produk, (f) peningkatan nilai tambah dan perbaikan akses pasar, (g) pengembangan unit usaha bersama, (h) perbaikan permodalan, (i) pewilayahan komoditas atas dasar, ketersediaan, nilai tambah, daya saing, dan pendapat-

an, serta (j) pengembangan infrastruktur dan pengaturan tataniaga dan insentif usaha.

Untuk dapat melaksanakan strategi tersebut diperlukan dukungan kebijakan harga, tataniaga, subsidi, pembiayaan, investasi, dan moneter, standarisasi, dan karantina. Upaya untuk mempertahankan laju peningkatan produksi sebesar 4.24 persen per tahun sampai tahun 2010, akan lebih mengandalkan pada peningkatan produktivitas sebesar 3.38 persen per tahun; sementara laju peningkatan areal panen diproyeksikan sebesar 1.0 persen per tahun. Hal ini ditempuh dengan memperluas penggunaan benih hibrida dan komposit unggul dengan benih berkualitas, disertai dengan penerapan teknologi budidaya maju.

Dalam upaya peningkatan produktivitas, pada daerah-daerah yang telah memiliki tingkat produktivitas tinggi (> 6.0 t/ha), dilakukan pemantapan produktivitas. Untuk meningkatkan hasil bagi areal yang tingkat produktivitasnya masih rendah (< 5.0 t/ha), dilakukan adanya pergeseran penggunaan jagung ke jenis hibrida dan komposit dengan benih berkualitas. Melalui program pergeseran penggunaan jenis, varietas, dan benih tersebut diperlukan (a) perbaikan produksi dan distribusi benih berkualitas jagung hibrida dan komposit unggul, (b) pembentukan penangkar benih berbasis komunal di pedesaan, serta (c) penerapan pengelolaan sumberdaya dan tanaman terpadu (PTT).

Perluasan areal tanam diarahkan ke luar Jawa yang berpotensi cukup luas melalui pemanfaatan lahan sawah selama musim kemarau yang tidak ditanami padi, serta pengoptimalan dan penambahan luas baku lahan kering. Selama kurun waktu 2005 - 2010 diharapkan dapat terjadi tambahan areal panen seluas 456 810 hektar. Upaya peningkatan areal panen akan lebih difokuskan pada lahan sawah setelah pertanaman padi (peningkatan IP).

Tabel 2. Target Produksi dan Ekspor Jagung yang Akan Dicapai dari Tahun 2005 - 2010 (000 ton)

Tahun	Produksi	Konsumsi	Kebutuhan		Total	Potensi ekspor
			Industri	Pakan		
2005	11 836.30	4 209.4	2 712.7	4 922.1	11 844,2	- 7.90
2006	12 338.16	4 128.5	2 762.8	5 259.0	12 150,4	187.76
2007	12 861.30	4 049.2	2 853.7	5 619.0	12 522.0	339.30
2008	13 406.62	3 971.4	2 947.6	6 003.7	12 922.7	483.92
2009	13 975.06	3 895.1	3 044.6	6 414.7	13 354.4	620.66
2010	14 567.60	3 805.0	3 144.8	6 606.8	13 556.6	1 011.00
Laju (%/th)	4.24	-2.00	3.00	6.08	2,74	

Sumber : Departemen Pertanian (2005)

Pemanfaatan lahan sawah setelah pertanaman padi (biasanya pada musim kemarau) akan diarahkan pada lahan yang tersedia air irigasi, baik dari air irigasi permukaan maupun air tanah. Untuk memanfaatkan air tanah harus direncanakan pembuatan sumur dan penyediaan pompanya.

Pada lahan kering, penetapan areal perlu dilakukan melalui pewilayahan komoditas sehingga tidak terjadi tumpang-tindih rencana penggunaan lahan dengan komoditas lain. Di sisi lain, supaya proses produksi jagung pada lahan kering berkelanjutan, maka aspek konservasi lahan perlu mendapat perhatian.

Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil dilaksanakan melalui : (a) Pengembangan dan penanganan pasca panen dalam rangka meningkatkan mutu jagung yang terkait dengan penerapan manajemen mutu sehingga produk yang dihasilkan sesuai persyaratan mutu pasar konsumen. (b) Pembangunan unit-unit pengolahan di tingkat petani, gapoktan, dan asosiasi, (c) Pembangunan pusat pengeringan dan penyimpanan di setiap lokasi sentra produksi jagung; (d) Penguatan peralatan mesin yang terkait dengan kegiatan pengolahan dan penyimpanan jagung, antara lain: pengering jagung (*dryer*), *corn sheller* (pemipil), penepung, pemotong/pencacah bonggol, mixer (pencampur pakan), dan gudang.

Di bidang pengolahan dan pemasaran jagung diarahkan untuk mewujudkan tumbuhnya usaha pengolahan dan pemasaran jagung yang dapat meningkatkan nilai tambah harga yang wajar ditingkat petani, sehingga

petani dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Untuk mendukung kebijakan tersebut, maka upaya yang akan ditempuh adalah : (a) meningkatkan mutu dan pengolahan produk primer (bahan mentah) menjadi bahan setengah jadi; (b) Mendorong peningkatan harga jagung dan pembagian keuntungan (*profit sharing*) yang proporsional bagi petani. (c) menumbuhkan unit-unit pengolahan dan pemasaran jagung yang dikelola oleh kelompok tani/gabungan kelompok tani atau asosiasi perjagungan; (d) meningkatkan efisiensi biaya pengolahan dan pemasaran serta memperpendek mata rantai pemasaran; (e) Membentuk dan memfasilitasi informasi dan promosi, serta asosiasi jagung; (f) Pengembangan industri berbasis jagung produk dalam negeri.

c. Kedelai

Pencapaian program swasembada kedelai pada tahun 2015 memerlukan dukungan kebijakan investasi, mulai dari subsistem hulu hingga subsistem hilir. Prospek pengembangan komoditas kedelai cukup cerah, mengingat konsumsi kedelai dalam bentuk pangan olahan, terutama tahu, tempe dan kecap, akan terus meningkat seiring dengan perkembangan jumlah penduduk.

Arah pengembangan komoditas kedelai mencakup pengembangan pada subsistem hulu (faktor produksi), subsistem produksi (*on-farm*), subsistem hilir, dan subsistem penunjang. Pengembangan komoditas kedelai diharapkan dapat berhasil apabila didukung oleh kebijakan pemerintah yang kondusif.

Tabel 3. Pencapaian Swasembada Kedelai pada Tahun 2015

Tahun	Kebutuhan (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)	Impor (Ton)
2004	1.947.000	564.883	12.80	723.199	1.115.793
2005	1.969.391	602.109	13.33	802.751	1.166.640
2006	1.992.038	641.788	13.88	891.053	1.100.985
2007	2.014.947	684.082	14.46	989.069	1.025.878
2008	2.038.119	729.163	15.06	1.097.867	940.252
2009	2.061.557	777.214	15.68	1.218.632	842.925
2010	2.085.265	828.433	16.33	1.352.682	732.583
2011	2.109.246	883.027	17.00	1.501.477	607.796
2012	2.133.502	941.218	17.71	1.666.639	466.863
2013	2.158.037	1.003.244	18.44	1.849.970	308.067
2014	2.182.855	1.069.358	19.20	2.053.466	129.388
2015	2.207.958	1.139.829	20.00	2.279.348	-71.390

Keterangan:

1. Kebutuhan diasumsikan meningkat \pm 1.14% pertahun.
2. Luas panen harus ditingkatkan \pm 6.59 % pertahun diikuti peningkatan produktivitas + 4.14% pertahun sehingga pada tahun 2015 mencapai swasembada.

Melalui berbagai upaya peningkatan produksi, swasembada kedelai diproyeksikan dapat dicapai pada tahun 2015, melalui peningkatan produksi sekitar 12 persen per tahun (Tabel 3) yang dicapai melalui peningkatan luas panen sebesar 6.6 % dan peningkatan produktivitas sebesar 4.1 % per tahun. Peningkatan produksi yang cukup tinggi ini sangat dimungkinkan, mengingat pada awal tahun 1990-an Indonesia mampu memproduksi kedelai hampir 2 juta ton.

Program aksi peningkatan produksi kedelai diarahkan untuk mencapai perluasan areal tanam sekitar 1.2 juta hektar dan peningkatan produktivitas sekitar 2.0 ton per hektar, yang diharapkan dapat dicapai tahun 2015. Upaya-upaya khusus yang dilakukan melalui (a) perluasan areal tanam (b) pengembangan pusat pertumbuhan (c) pengembangan usaha (d) pengembangan kemitraan.

Perluasan areal tanam dilakukan melalui peningkatan indeks pertanaman (IP) pada lahan sawah irigasi sederhana, lahan sawah tadah hujan atau lahan kering. Wilayah sasaran perluasan areal adalah NTB, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Utara, Aceh, dan Sulawesi Selatan.

Teknologi utama yang diperlukan upaya peningkatan produktivitas adalah penggunaan benih varietas unggul yang bermutu, pengendalian gulma dan hama (OPT) secara terpadu, perbaikan kesuburan lahan dengan pemupukan sesuai kebutuhan (spesifik lokasi), waktu/musim tanam yang sesuai dan rotasi tanaman.

Pengembangan pusat pertumbuhan merupakan upaya pengembangan usaha tani yang memenuhi skala ekonomi, sehingga memungkinkan tumbuh dan berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berkelanjutan, berupa kegiatan dengan pendekatan pola Sekolah Lapang (SL) yang diharapkan dapat meluas ke daerah sekitarnya dengan luas unit pilot proyek pengembangan seluas 500 hektar.

Pengembangan usaha merupakan upaya pengelolaan usaha tani yang menerapkan perpaduan rekayasa sosial, teknologi serta ekonomi dan nilai tambah secara terencana dan berkelanjutan atas dasar kerja sama antara anggota kelompok tani/perorangan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dengan memanfaatkan potensi sumber daya secara terpadu.

Pengembangan kemitraan merupakan upaya menumbuhkan/mengembangkan jalinan kerja sama antara petani dengan swasta dan *stake holder* lainnya yang bergerak dibidang

agribisnis, mulai dari hulu sampai ke hilir (pengusaha saprodi, penangkar benih, perusahaan pengelola hasil, perdagangan), serta lembaga keuangan lainnya. Dengan adanya koordinasi antara pihak terkait, maka diharapkan hubungan sinergis antara subsistem agribisnis akan berjalan sempurna.

d. Gula

Pengembangan industri gula memerlukan investasi yang sangat besar, sehingga konsistensi kebijakan menjadi salah satu kebijakan kunci. Berbagai kebijakan pergulaan baik itu kebijakan produksi, perdagangan, dan investasi seyogyanya dijalankan secara konsisten dengan perspektif jangka panjang. Di samping itu, industri dan perdagangan gula di pasar internasional sangat distortif, sehingga pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang dapat menciptakan medan persaingan yang adil untuk industri gula nasional. Salah satu pilihan kebijakan antara lain dengan mempertahankan esensi kebijakan yang kini diterapkan (tataniaga impor) atau dengan menerapkan kombinasi kebijakan *tarif-rate quota* yang dikombinasikan dengan kebijakan jaminan harga. Karena industri gula memerlukan investasi yang besar dan mempunyai peran penting dalam perekonomian Indonesia, maka pengembangan industri gula di luar Jawa perlu didorong. Hal ini akan terwujud bila pemerintah memberikan insentif dan kemudahan, seperti jaminan keamanan dalam berusaha, keringanan perpajakan, kemudahan perijinan, kemudahan dalam memperoleh lahan, dan dukungan infrastruktur. Dukungan pendanaan untuk rehabilitasi atau konsolidasi PG juga diperlukan, karena keterbatasan dana yang dimiliki PG-PG di Jawa untuk melakukan rehabilitasi dan konsolidasi. Pemberian dukungan pendanaan bagi petani saja tanpa dukungan pendanaan untuk rehabilitasi PG akan membuat upaya peningkatan efisiensi tidak akan optimal. Untuk mendukung kondusifnya situasi pergulaan nasional, pihak swasta pada dasarnya berminat untuk menanamkan modalnya, termasuk untuk melakukan rehabilitasi PG. Swasta akan melakukan investasi bila dana tersebut langsung untuk merehabilitasi PG, tidak lewat perusahaan holdingnya (PTPN). Dengan demikian pemerintah perlu mempermudah proses spin-off atau membuat PG menjadi semacam SBU yang mandiri.

Dukungan lainnya yang diperlukan, baik berupa fasilitasi maupun infrastruktur adalah: (a) perlindungan dan penyediaan fasilitas berproduksi (proteksi dan promosi, jaminan keamanan, dan *tax holiday* untuk angka waktu

tertentu); (b) pengembangan sistem pembiayaan bagi petani tebu dan pelaku usaha pergulaan; (c) penguatan lembaga penelitian dan pengembangan serta lembaga pendidikan pergulaan, termasuk pengembangan sinergi antar lembaga dimaksud; (d) pengembangan infrastruktur (irigasi, jalan, pelabuhan) untuk mendukung pengembangan sistem industri gula terpadu, termasuk *spin of* pembentukan SBU untuk masing-masing PG; (e) penyusunan rencana induk (*Masterplan*) pengembangan industri gula berbasis tebu, baik di masing-masing sentra produksi gula maupun keterkaitan antar sentra produksi; dan (f) promosi investasi dalam mendukung percepatan pengembangan industri gula terpadu.

Prospek pengembangan tebu di dalam negeri (Indonesia) masih sangat baik. Demikian juga prospek pengembangan industri gula dan industri turunan lainnya yang berbasis tebu juga sangat baik. Dari sisi pasar, permintaan gula dari dalam negeri masih terbuka sekitar 1.4 juta ton per tahun. Selain prospektif, industri gula nasional juga mempunyai potensi yang cukup besar untuk dikembangkan di masa yang akan datang.

Selain sebagai bahan baku utama industri gula, banyak produk turunan dari tebu yang mempunyai potensi nilai ekonomi yang dapat dikembangkan karena mempunyai peluang pasar yang masih terbuka, baik di pasar domestik maupun internasional. Beberapa produk turunan dari tebu adalah etanol (asam asetat, ethyl asetat), ragi roti, PST (*inactive yeast*), Ca-sitrat dan listrik berpeluang besar mengisi pasar domestik, sementara produk turunan tebu yang memiliki peluang pasar luar negeri antara lain wafer pu-

cuk tebu, papan partikel, papan serat, pulp, kertas, asam sitrat, Ca-sitrat, jamur. Produk turunan lainnya yang memiliki pasar yang besar adalah asam sitrat. Pasar terbesar adalah industri minuman dan deterjen.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Program Akselerasi Peningkatan Produktivitas Gula Nasional 2002-2007 pada bulan Mei 2005 yang diikuti oleh seluruh stakeholder pergulaan, serta melihat perkembangan jumlah penduduk dan proyeksi konsumsi gula nasional diketahui bahwa upaya yang dilakukan selama ini masih jauh dari yang diharapkan. Untuk itu dilakukan *rescheduling*, yaitu dari target tahun 2007 menjadi tahun 2009, seperti terlihat pada Tabel 4.

Konsumsi gula diperkirakan meningkat dengan laju 1.45 persen per tahun, seiring laju pertumbuhan penduduk sebesar 1.49 persen per tahun; sedangkan produksi gula diperkirakan meningkat dengan laju pertumbuhan 10 persen per tahun, sehingga pada 2009 diperkirakan produksi gula mencapai 92.28 persen dari total kebutuhan dalam negeri. Dengan kata lain, pada 2009, Indonesia dapat mencapai kemandirian (swasembada) gula. Pencapaian swasembada tersebut dilakukan dengan meningkatkan produktivitas gula nasional rata-rata menjadi 7.6 ton hablur/ha dan rendemen rata-rata 8.5 persen.

Disamping pencapaian upaya teknis tersebut, pencapaian swasembada dengan menekan biaya produksi sehingga rata-rata biaya produksi gula nasional di bawah Rp 2 800/kg. Dengan pencapaian swasembada gula tersebut diharapkan pendapatan petani minimal Rp 8 juta/ha.

Tabel 4. Proyeksi Konsumsi dan Produksi Gula Nasional 2005 - 2009

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
Konsumsi					
Jumlah penduduk (juta)	221.64	224.85	228.11	231.41	234.78
Konsumsi/kapita (kg)	15	15	15	15	15
Proyeksi konsumsi (ton)	3 324 584	3 372 790	3 421 695	3 471 310	3 521 644
Pertumbuhan konsumsi	1.45%	1.45%	1.45%	1.45%	1.45%
Produksi					
Luas (ha)	367 875	377 930	385 773	405 062	425 315
Produksi tebu (ton)	28 300 904	32 656 204	34 289 014	36 003 465	37 803 638
Tebu (ton/ha)	76.90	86.41	88.90	89.00	88.90
Hablur (ton)	2 219 780	2 441 758	2 685 934	2 954 527	3 249 980
Hablur (ton/ha)	6.03	6.46	6.96	7.29	7.64
Rendemen (%)	7.84	7.48	7.83	8.21	8.60
Impor (ton)	1 104 804	931 032	735 762	516 783	271 664
Pertumbuhan impor (%)	-	-15.73%	-20.9%	-29.76%	-47.43%
Pertumbuhan produksi (%)	8.3%	10%	10%	10%	10%

Sumber : Departemen Pertanian (2005)

Langkah-langkah operasional yang perlu ditempuh dalam mencapai swasembada gula nasional di bidang *on farm, of farm*, ekstensifikasi dan dukungan kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

On Farm: Salah satu persoalan yang berkaitan dengan usahatani tebu adalah masih dominannya tanaman keprasan (*ratoon*) yang frekuensinya sudah melampaui rekomendasi teknis. Kondisi pertanaman yang demikian membawa konsekuensi aspek teknis yang serius, yaitu: (a) pertanaman tebu masih didominasi varietas lama karena rehabilitasi tanaman dengan varietas unggul baru terhambat, (b) tanaman tebu menjadi kurang terpelihara dengan baik, sehingga tanaman mudah terserang hama dan penyakit, seperti RSD (*ratoon stunting disease*) dan PLA (penyakit luka api), dan (c) produktivitas dan kualitas tebu yang dihasilkan relatif rendah dibandingkan dengan produktivitas tanaman baru. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya sebagai berikut: (a) bongkar *ratoon*, yaitu pergantian tanaman keprasan dengan tanaman baru (*plant cane*) yang ditargetkan 70 ribu hektar setiap tahun, sedangkan untuk tanaman keprasan maksimal tiga kali kepras. (b) Penyediaan bibit, dilakukan dengan membangun kebun bibit datar (KBD) seluas 9 000 ha, kebun bibit induk (KBI) seluas 1 100 ha, kebun bibit nenek (KBN) seluas 200 ha dan kebun bibit pokok (KBP) seluas 35 ha setiap tahun. (c) Penyediaan pengairan, khusus untuk lahan kering (seluas 250 ribu ha) dilakukan dengan pembangunan sumur bor, embung dan pompanisasi. Sedangkan untuk lahan irigasi (seluas 100 ribu ha) dilakukan pengaturan yang seimbang dengan tanaman lainnya, khususnya padi. (d) Penyediaan pendanaan, untuk tanaman tebu secara efisien, tepat waktu dan tepat jumlah, baik dari sumber APBN, APBD dan lembaga perbankan. Dana tersebut dimanfaatkan untuk bongkar *ratoon* dan pemeliharaan tanaman serta pengadaan alat pengolahan tanah (traktor).

Off Farm: Penurunan areal tanaman tebu di wilayah-wilayah kerja PG yang tidak dapat dikompensasi oleh kenaikan produktivitas tebu menyebabkan ketersediaan bahan baku tebu kian terbatas. Kondisi tersebut mengakibatkan PG di Jawa mengalami *idle capacity* sekitar 46.2 persen, sementara PG di luar Jawa mengalami *idle capacity* sebesar 39.4 persen. Selain itu, sebagian besar (53%) pabrik gula di Jawa didominasi oleh PG-PG dengan kapasitas giling kecil (<3 000 TCD), 44 persen berkapasitas giling 3 000-6 000 TCD, dan hanya 3.0 persen yang berkapasitas giling di atas

6 000 TCD. Sekitar 68 persen dari jumlah PG yang ada telah berumur lebih dari 75 tahun (umumnya berskala kecil) serta kurang mendapat perawatan secara memadai. Biaya produksi gula/ton pada PG berskala kecil jauh lebih tinggi dibandingkan dengan PG berskala besar atau bermesin relatif baru. Kondisi ini menyebabkan tingkat efisiensi yang rendah (dilihat dari unit *cost/kg* gula yang dihasilkan).

Produktivitas gula di luar Jawa (juga nasional) banyak dipengaruhi oleh PG yang dikelola swasta dengan skala produksi cukup besar (>8 000 TCD) yang didukung oleh penguasaan lahan HGU dalam luasan yang memadai. PG ini mampu meningkatkan efisiensi dengan menerapkan pola pengelolaan budidaya dan penggilingan dalam satu manajemen yang sama, serta mampu pula menerapkan peralatan modern bersifat *capital intensive* pada kegiatan-kegiatan pengolahan lahan, tebang-angkut tebu, serta pada penyediaan air. Untuk mengatasi hal tersebut, upaya yang perlu dilakukan adalah melakukan rehabilitasi pabrik. Dari 58 PG yang masih beroperasi saat ini, 52 PG sangat mendesak untuk dilakukan rehabilitasi. Rehabilitasi tersebut mencakup peningkatan kapasitas stasiun energi, otomatisasi, rehabilitasi stasiun giling dan modernisasi stasiun masukan (*vacum pan*). Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi pabrik gula (*rendemen* dan produktivitas *hablur*).

e. *Daging Sapi*

Keberhasilan revitalisasi agribisnis sapi melalui pengembangan program investasi dengan melibatkan peran pemerintah, swasta, dan masyarakat peternak akan sangat ditentukan oleh dukungan kebijakan strategis pengembangan yang mencakup tiga dimensi utama agribisnis, yaitu kebijakan pasar input, budidaya, serta pemasaran dan perdagangan. Dari ketiga dimensi tersebut, kebijakan dalam hal pemasaran (perdagangan) akan memegang peranan kunci. Keberhasilan kebijakan pasar output akan memberi dampak langsung terhadap bagian harga dan pendapatan yang diterima pelaku agribisnis (swasta dan peternak) yang pada akhirnya akan memantapkan proses adopsi teknologi, peningkatan produktivitas, dan pada akhirnya menjamin keberlanjutan investasi ke depan.

Disamping itu juga diperlukan peningkatan penyediaan dan aksesibilitas kredit perbankan (bagi swasta) dan kredit program (bagi peternak plasma) dengan tingkat bunga

rendah. Tingkat suku bunga 6 persen per tahun dinilai cukup memadai, khususnya bagi usaha *cow-calf operation* (output sapi bakalan) dengan masa investasi yang relatif lama dan tingkat keuntungan yang relatif marginal. Skim kredit investasi bagi peternak tetap perlu difasilitasi dengan pendampingan teknologi, manajemen usaha, dan pembinaan kemandirian kelompok peternak.

Kebijakan dalam pengendalian impor daging yang legal dan ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal), sapi bakalan dan sapi produktif hendaknya mempertimbangkan beberapa aspek seperti pencegahan pengurasan populasi, kemampuan produksi dalam negeri (termasuk keberhasilan program investasi), insentif perdagangan ternak sapi antar pulau, dengan kinerja pengembangan usaha perbibitan dalam negeri.

Kebijakan pengembangan bahan baku pakan lokal di daerah sentra produksi juga diperlukan, sehingga dapat menekan biaya produksi. Kebijakan yang terkait dengan pengadaan pakan ini adalah pengembangan usaha peternakan terintegrasi (*crop livestock system*), pengembangan peternakan sapi tipe dwiguna (peningkatan produksi susu) di kawasan pertanian intensif, atau kemungkinan substitusi sapi dengan kerbau di kawasan yang memiliki adaptasi/agroekosistem yang sesuai. Oleh karena itu kebijakan ekspor bahan pakan harus benar-benar memperhatikan kebutuhan pakan di dalam negeri, antara lain melalui penetapan tarif ekspor atau kebijakan insentif lainnya.

Memperjuangkan daging sapi sebagai produk spesifik yang dinilai sangat strategis dalam mendorong pembangunan pertanian dan perdesaan, penyerapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan, pembangunan '*ru ral livelihood*', dengan penguatan ketersediaan pangan dari produksi dalam negeri. Perjuangan ini perlu dikomplemen dengan perjuangan untuk mendapatkan perlakuan SSM (*special safeguard mechanism*) sehingga terdapat fleksibilitas dalam pembatasan impor ketika terjadi banjir impor dan harga jatuh.

Dukungan kebijakan dalam hal promosi untuk mengkonsumsi dan mencintai produk dalam negeri yang dijamin ASUH akan sangat membantu pengembangan agribisnis sapi di Indonesia. Dalam hal budidaya, perlu dukungan kebijakan yang terus menerus tentang pentingnya usaha sapi pola integrasi (*Crop Livestock System*), agar diperoleh sinergi dengan usaha pertanian lainnya. Langkah ini merupakan awal untuk merebut pasar global,

karena saat ini Indonesia merupakan negara yang bebas PMK (bersama Australia, New Zealand, dan Amerika Utara), dan BSE, sehingga produknya dapat dipasarkan ke seluruh dunia.

Pengembangan usaha peternakan sapi potong untuk menghasilkan daging sapi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Dengan mempertimbangkan asumsi peningkatan populasi ternak sapi potong (5.82%/tahun), peningkatan jumlah penduduk (1.49%/tahun) dan peningkatan konsumsi daging sapi per kapita (5.0%/tahun), selama kurun waktu 5 tahun ke depan ketergantungan impor daging sapi diperkirakan dapat dikurangi. Hal ini memerlukan terobosan untuk mendorong investasi, sehingga tidak menutup kemungkinan produksi daging sapi dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan domestik menuju swasembada daging sapi tahun 2010 (Tabel 5).

Peningkatan produksi daging sapi dilakukan dengan peningkatan populasi ternak dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain: (a) mempercepat umur beranak pertama, dari sekitar 4.5 tahun jadi kurang dari 3.5 tahun, (b) memperpendek jarak beranak dari 18 bulan menjadi sekitar 12-14 bulan sehingga diperoleh tambahan jumlah anak selama masa produksi sekitar 2 ekor/induk, (c) menekan angka kematian anak dan induk, (d) mengurangi pematangan ternak produktif dan ternak kecil/muda, (e) mendorong perkembangan usaha perbibitan penghasil sapi bibit, (f) mendorong swasta untuk menambah populasi ternak produktif melalui impor sapi betina komersial muda dan fertil, serta (g) impor sapi bakalan muda yang siap digemukkan selama lebih dari 4 bulan.

Secara khusus, untuk mewujudkan swasembada daging sapi tahun 2010, dilakukan kebijakan teknis sebagai berikut: (a) Mengembangkan agribisnis sapi pola integrasi tanaman-ternak berskala besar dengan pendekatan LEISA dan *zero waste*, terutama di wilayah perkebunan, (b) Mengembangkan dan memanfaatkan sapi lokal unggul sebagai bibit melalui pelestarian, seleksi dan persilangan dengan sapi introduksi; (c) Mengevaluasi kelayakan penerapan persilangan, teknologi IB, pengembangan BIB Daerah, dan teknologi embrio transfer secara selektif; (d) Memanfaatkan teknologi veteriner untuk menekan angka kematian; (e) Mengembangkan dan memanfaatkan produksi biogas dan kompos secara masal untuk tanaman guna memperoleh nilai tambah ekonomi bagi peternak; (f) Pengembangan SNI produk kompos.

Tabel 5. Perkiraan Penyediaan, Kebutuhan, Neraca dan Populasi Ideal Sapi di Indonesia, 2005 - 2010

DAGING SAPI	2005	2006	2007	2008	2009	2010
PRODUKSI						
Populasi sapi (000 ekor)	11 045.90	11 746.17	12 467.38	13 210.16	13 975.14	14 763.00
Pertumbuhan (%)	2.98	6.34	6.14	5.96	5.79	5.64
Kelahiran (000 ekor)	2 396.83	2 548.78	2 705.28	2 866.45	3 032.44	3 203.40
Kematian (000 ekor)	174.76	185.83	197.24	209.00	221.10	233.56
<i>Replacement</i> (000 ekor)	700.27	721.21	742.77	764.98	417.86	441.41
Total Pemotongan (000 ekor)	1 891.45	1 837.82	1 765.26	1 892.47	2 393.49	2 528.42
a. Pemotongan IB (000 ekor)	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
b. Pemotongan Kawin Alam (000 ekor)	1 391.45	1 337.82	1 265.26	1 392.47	1 893.49	2 028.42
Produksi daging sapi (a+b) (000 ton)	271.84	265.19	256.20	271.97	334.05	350.77
Impor sapi betina muda (000 ekor)	0	500	500	0	0	0
Impor (000 ekor)	0	325	812.5	792.19	1 254.30	1 858.34
Tambahan populasi (000 ekor)	0	825	1 725	1 448.44	1 650.39	2 485.49
Tambahan produksi daging (000 ton)	0	23.24	58.09	56.64	89.68	132.87
Total produksi daging (000 ton)	271.84	288.43	314.30	328.61	423.73	483.64
KEBUTUHAN						
Penduduk (juta orang)	219.67	222.97	226.31	229.71	233.15	236.65
Pertumbuhan penduduk (%)	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49
Konsumsi daging (kg/kap/thn)	1.72	1.79	1.86	1.94	2.01	2.09
Total konsumsi (000 ton)	378.93	399.66	421.52	444.58	468.90	494.55
NERACA						
Produksi - kebutuhan (000 ton)	(107.09)	(111.22)	(107.22)	(115.97)	(45.17)	(10.92)
Persentase kekurangan	(28.26)	(27.83)	(25.44)	(26.09)	(9.63)	(2.21)
Setara dengan sapi hidup (000 ekor)	(864.22)	(897.62)	(865.33)	(935.94)	(364.55)	(88.09)
Betina produktif (000 ekor)	(1 389.87)	(1 443.58)	(1 391.65)	(1 505.21)	(586.29)	(141.67)
Persentase kekurangan populasi	12.58	11.48	10.10	10.75	3.85	0.85
POPULASI IDEAL	11 910.12	13 468.79	14 645.21	14 938.28	15 593.99	16 709.43

Sumber : Ditjen Peternakan, Departemen Pertanian (2005)

Kebijakan Regulasi dilakukan dengan : (a) Mencegah terjadinya pemotongan hewan betina produktif dan ternak muda dengan ukuran kecil yang saat ini jumlahnya masih sangat tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan peraturan yang berlaku melalui pendekatan sosial budaya masyarakat setempat; (b) Melarang ekspor sapi betina produktif, terutama sapi lokal yang sudah terbukti keunggulannya (terutama sapi Bali), karena selain memicu terjadinya pengurusan sapi di dalam negeri juga ekspor bibit sapi tersebut akan memberi kesempatan negara pengimpor untuk mengembangkan plasma nutfah Indonesia dan menjadi kompetitor produsen sapi di masa depan. (c) Mencegah dan melarang masuknya daging dari negara yang belum bebas penyakit berbahaya, terutama PMK, BSE dan penyakit lainnya sesuai anjuran OIE,

serta memberantas masuknya daging ilegal yang tidak ASUH; (d) Meninjau kembali aturan impor daging dan jerohan yang tidak berkualitas, serta sapi potong dengan ukuran besar, baik melalui pendekatan *sanitary and phytosanitary* (SPS) maupun tarif progresif yang layak, berturut-turut untuk sapi bakalan, sapi potong, daging dan jerohan yang semakin tinggi; (e) Mendorong swasta untuk mengembangkan ternak komersial ex impor yang produktif untuk dikawinkan dengan sapi lokal yang lebih adaptif; (f) Pemberian insentif berupa kredit bunga rendah melalui kredit usaha mikro, kecil maupun usaha menengah yang mengembangkan sapi perbibitan; (g) Kebijakan pengembangan diversifikasi produk daging olahan; (h) Meningkatkan sarana dan prasarana usaha agribisnis sapi.

Tabel 6. Matriks Kegiatan Operasional Pembangunan Ketahanan Pangan 2005-2009

No	Tujuan Kebijakan	Kegiatan	Instansi	Indikator keberhasilan (output)
1	Menjamin Ketersediaan Pangan :	Pengembangan lahan abadi 15 juta ha lahan beririgasi dan 15 juta ha lahan kering	Penanggung Jawab : DepPU Pendukung : Deptan, Dephut, BPN	Tersedianya lahan abadi total 15 juta hektar lahan sawah dan 15 juta hektar lahan kering untuk produksi pangan
		Pengembangan konservasi dan rehabilitasi lahan	Penanggung Jawab : Dephut Pendukung : Deptan, DKP, DepPU, Meneg KLH	Tersedianya areal konsevasi yang khusus diperuntukan keseimbangan ekosistem dan kelestarian Sumberdaya hayati
		Pelestarian sumberdaya air dan pengelolaan daerah aliran sungai	Penanggung Jawab : DepPU Pendukung : Deptan, DKP, Dephut, Meneg KLH	Tersedianya pasokan air untuk produksi pertanian sepanjang tahun
		Pengembangan dan penyediaan benih, bibit unggul, dan alsintan	Penanggung Jawab : Deptan Pendukung : DKP, Depkeu, Depperin, Menegkop & UKM, Bank	Tersedianya sarana produksi yang memadai dan terjangkau petani
		Pengaturan pasokan gas untuk memproduksi pupuk	Penanggung Jawab : Meneg BUMN Pendukung : Depperin	Tersedianya pupuk dengan harga terjangkau
		Pengembangan skim permodalan bagi petani/nelayan	Penanggung Jawab : Menko Perekonomian Pendukung : Depkeu, Menegkop & UKM	Tersedianya skim kredit yang mudah diakses oleh petani/nelayan
		Peningkatan produksi dan produktivitas (perbaikan genetik & teknologi budidaya)	Penanggung Jawab : Deptan Pendukung : DKP, Meneg Ristek, BMG	Peningkatan produktivitas pangan yang dihasilkan di dalam negeri.
		Pencapaian swasembada 5 komoditas strategis (Padi, Jagung, Kedelai, Tebu, Daging Sapi)	Penanggung Jawab : Deptan Pendukung : Depkeu, Dep PU, Depperin, Pemda	Tersedianya bahan pangan utama dari produksi dalam negeri
		Penyediaan insentif investasi di bidang pangan termasuk industri gula, peternakan, dan perikanan	Penanggung Jawab : Depperin Pendukung : Depkeu, Deptan, BKPM	Berkembangnya usaha di bidang pangan sebagai usaha yang menguntungkan
		Penguatan penyuluhan, kelembagaan petani/nelayan dan kemitraan	Penanggung Jawab : Deptan Pendukung : DKP, Depperin, Depsos, Depdagri, Menegkop & UKM	Berkembangnya kelembagaan petani/nelayan sebagai lembaga usaha yang menguntungkan
2	Menata Pertanahan dan Tata Ruang dan Wilayah	Pengembangan reforma agraria	Penanggung Jawab : BPN Pendukung : Bappenas, Depdagri, Dep PU, Pemda	Terwujudnya kebijakan pengelolaan lahan pertanian.
		Penyusunan tata ruang daerah dan wilayah	Penanggung Jawab : Dep PU Pendukung : Bappenas, BPN, Deptan, Pemda	Tersusunnya RUTRW yang dapat diakses oleh seluruh lapisan Masyarakat
		Perbaikan administrasi pertanahan dan sertifikasi lahan	Penanggung Jawab : BPN Pendukung : Bappenas, Deptan, Dephut, Pemda	Terciptanya administrasi petanahan yang memadai dan tidak memberatkan rakyat
		Pengenaan sistem perpajakan progresif bagi pelaku konversi lahan pertanian subur dan yang mentelantarkan lahan pertanian	Penanggung Jawab : Depkeu Pendukung : Depkum&HAM, BPN	Terhentinya konversi lahan subur beririgasi.
3	Mengembangkan Cadangan Pangan	Pengembangan cadangan pangan pemerintah (nasional, daerah dan desa)	Penanggung Jawab : Menko Kesra Pendukung : Menko Perekonomian, Depdagri, Deptan, Depsos, Pemd	Tersedianya cadangan pangan pokok di setiap daerah (setiap desa)

Tabel 6. Lanjutan

No	Tujuan Kebijakan	Kegiatan	Instansi	Indikator keberhasilan (output)
	Mengembangkan Cadangan Pangan	Pengembangan lumbung pangan masyarakat	Penanggung Jawab : Deptan Pendukung : Depdagri, Depdag, Menekop&UKM	Terintegrasinya system cadangan pemerintah dan cadangan masyarakat
4	Mengembangkan Sistem Distribusi Pangan yang Adil dan Efisien	Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana distribusi	Penanggung Jawab : Dephub Pendukung : Dep PU, Depdag, Pemda	Pengerasan jalan desa dan jalan usahatani, dengan prioritas pada daerah lumbung pangan
		Penghapusan retribusi produk pertanian dan perikanan	Penanggung Jawab : Depdag Pendukung : Dephub, DKP, Menekop&UKM, Pemda	Hilangnya retribusi yang memberatkan petani dan pedagang kecil
		Pemberian subsidi transportasi bagi daerah yang sangat rawan pangan dan daerah terpencil	Penanggung Jawab : Dephub Pendukung : Depkeu, Meneg BUMN, Meneg PDT	Tersedianya pangan di daerah rawan pangan dan daerah terpencil
		Pengawasan sistem persaingan perdagangan yang tidak sehat	Penanggung Jawab : Depdag	Berlakunya mekanisme pasar yang <i>fair</i> dan berkeadilan
5	Menjaga Stabilitas Harga Pangan	Pemantauan harga pangan pokok secara berkala	Penanggung Jawab : Depdag Pendukung : Deptan, Pemda	Tersedianya data dan sebaran harga pangan strategis serta stabilnya harga pangan.
		Pengelolaan pasokan pangan dan cadangan penyangga untuk stabilitas harga pangan	Penanggung Jawab : Depdag Pendukung : Deptan, Meneg BUMN	Siap sedianya pasokan pangan pada, terutama pada saat paceklik, gagal panen dan bencana alam
6	Meningkatkan Aksesibilitas Rumah Tangga terhadap Pangan	Pemberdayaan masyarakat miskin dan rawan pangan	Penanggung Jawab : Menko Kesra Pendukung : Depkes, Deptan, Depsos,	Berkurangnya kasus rawan pangan dan balita yang menderita gizi buruk
		Peningkatan efektivitas program raskin	Penanggung Jawab : Meneg BUMN Pendukung : Depdagri, Pemda	Berkurangnya kasus tingkat "salah-sasaran" dan meningkatnya kriteria tepat lainnya
7	Melakukan Diversifikasi Pangan	Peningkatan diversifikasi konsumsi pangan dengan gizi seimbang	Penanggung Jawab : Depkes Pendukung : Deptan, DKP, Depdiknas, Pemda	Berkembangnya sumber energi dan protein dari pangan alternatif yang ada
		Pemberian makanan tambahan untuk anak sekolah (PMTAS)	Penanggung Jawab : Diknas Pendukung : Deptan, Depkes, Pemda	Meningkatnya kesehatan dan kecerdasan anak sekolah yang tercermin dari absensi kehadiran dan nilai yang diperoleh
		Pengembangan teknologi pangan	Penanggung Jawab : Meneg Ristek Pendukung : Depperin, Deptan, DKP	Tersedianya pangan alternatif yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap pangan pokok seperti beras
		Diversifikasi usahatani dan pengembangan pangan lokal	Penanggung Jawab : Deptan Pendukung : Depperin, Meneg.Kop.UKM, Pemda,	Terintegrasinya peran komoditi pangan segar/primer dengan peran pangan olahan
8	Meningkatkan Mutu dan Keamanan	Pengembangan dan penerapan sistem mutu pada proses produksi, olahan dan perdagangan pangan	Penanggung Jawab : BSN Pendukung : Depkes, Deptan, DKP, Depperin, Depdag, Pemda	Bertambahnya pemahaman masyarakat, produsen pangan besar dan usaha kecil menengah tentang pangan bermutu dan aman bagi kesehatan

Tabel 6. Lanjutan

No	Tujuan Kebijakan	Kegiatan	Instansi	Indikator keberhasilan (output)
	Pangan	Peningkatan kesadaran mutu dan keamanan pangan pada konsumen	Penanggung Jawab : BPOM Pendukung : Depkes, Depperin, Depdag, Depdiknas, Pemda,	Meningkatnya kualitas keamanan, mutu pangan, kehalalan pangan yang dikonsumsi masyarakat
		Pencegahan dini dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan mutu dan keamanan pangan	Penanggung Jawab : BPOM Pendukung : Depkes, Depag, Depperin, Depdag, Pemda,	Berkurangnya pangan tidak mutu dan tidak aman, dan terciptanya mekanisme penanganan dampak negatif pangan.
9	Mencegah dan Menangani Keadaan Rawan Pangan dan Gizi	Pengembangan isyarat dini dan penanggulangan keadaan rawan pangan	Penanggung Jawab : Deptan Pendukung : Depdagri, Depkes, DKP, Dephub, Depsos, Pemda	Meningkatnya kemampuan setiap rumah tangga untuk mengetahui potensi terjadinya rawan pangan
		Peningkatan keluarga sadar gizi melalui penyuluhan dan bimbingan sosial dengan menyempurnakan sistem komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)	Penanggung Jawab : Depkes Pendukung : Depdiknas Depkominfo, Pemda	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang gizi seimbang
		Pemanfaatan lahan pekarangan untuk peningkatan gizi keluarga	Penanggung Jawab : Deptan Pendukung : Depkes, Depdiknas, Pemda	Peningkatan produksi dan konsumsi pangan keluarga dengan kandungan gizi seimbang.
10	Memfasilitasi Penelitian dan Pengembangan	Alokasi anggaran negara yang memadai untuk penelitian dan pengembangan	Penanggung Jawab: Meneg Ristek Pendukung : Deptan, DKP, Depkeu, Depkes, Depperin, Depdiknas	Terwujudnya alokasi anggaran dana penelitian dan pengembangan bidang pangan sampai 1 persen dari PDB
		Peningkatan kerjasama dan kemitraan antara lembaga penelitian	Penanggung Jawab : Meneg Ristek Pendukung : Deptan, Depkes, DKP, Depdag, Depperin, Depdiknas	Semakin besarnya semangat sektor swasta untuk berpartisipasi dalam penelitian dan pengembangan pangan
11	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat	Pemberian penghargaan bagi masyarakat yang berjasa pada pembangunan ketahanan pangan gizi	Deptan, Depkes, Depdagri, Pemda	Semakin bergairahnya masyarakat untuk berpartisipasi membantu menanggulangi masalah pangan dan gizi
12	Melaksanakan Kerjasama Internasional	Penggalangan kerjasama internasional dalam melawan kelaparan dan kemiskinan	Penanggung Jawab : Deplu Pendukung : Depdag, Deptan, Depsos	Semakin kokohnya posisi Indonesia dalam perdagangan pangan di ASEAN, dan Asia Pasifik
		Perbaikan kinerja diplomasi ekonomi, politik, sosial dan budaya untuk meningkatkan ketahanan pangan	Penanggung Jawab : Deplu Pendukung : Depdag, Deptan, Depkes	Semakin dihormatinya Indonesia dalam arena perdagangan dan kerjasama ekonomi tingkat internasional
13	Mengembangkan Sumberdaya Manusia	Perbaikan program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan pangan	Penanggung Jawab : Deptan Pendukung : Depdiknas, Depkes, Depdagri, DKP, Pemda	Tersusunnya program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan pangan yang lebih komprehensif
		Pemberian muatan pangan dan gizi pada pendidikan formal & non formal	Penanggung Jawab : Depdiknas Pendukung : Depkes, Deptan, DKP, Pemda	Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pangan bermutu sejak usia dini
		Pemberian jaminan pendidikan dasar dan menengah khususnya bagi perempuan dan anak-anak di pedesaan	Penanggung Jawab : Depdiknas Pendukung : Depsos, Meneg PP, Pemda	Seluruh anak-anak di Indonesia mendapatkan pendidikan dasar dan menengah

Tabel 6. Lanjutan

No	Tujuan Kebijakan	Kegiatan	Instansi	Indikator keberhasilan (output)
14	Kebijakan Makro dan Perdagangan yang kondusif :	Kebijakan fiskal yang memberikan insentif dan keringanan pajak bagi usaha pertanian dan bisnis pangan	Penanggung Jawab : Menko Perekonomian Pendukung : Bappenas, Depkeu, Deptan DKP	Berkembangnya usaha pertanian dan bisnis pangan hingga ke tingkat desa
		Alokasi APBN dan APBD yang memadai bagi pengembangan sektor pertanian dan pangan	Penanggung Jawab : Bappenas Pendukung : Depkeu, Deptan, Depdagri, DKP, Pemda	Tersedianya dana APBD dan APBN yang memadai bagi pengembangan produk pertanian
		Kebijakan perdagangan yang memberikan proteksi dan promosi bagi produk pertanian strategis	Penanggung Jawab : Depdag Pendukung : Menko Perekonomian, Depperin, Depkeu, Deptan, Pemda	Terlaksananya kebijakan nasional yang melindungi produk pertanian strategis dari perdagangan yang tidak fair